

ABSTRAK

Jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan manusia yang perjalannya hingga saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sudah dijamin oleh konstitusi dan menjadi hak setiap warga negara. Negara selaku penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban penuh untuk menjamin hak tersebut melalui berbagai kebijakan salah satunya BPJS Kesehatan. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelerangga yang bernama *Coordination of Benefit* (Yang selanjutnya disebut COB) dimana mekanisme tersebut melibatkan pihak swasta sebagai penjamin asuransi komersil. Namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip indemnitas pada sistem COB dalam BPJS Kesehatan dimana dalam penggantian biaya dari pihak Penanggung, pihak Tertangung tidak boleh mendapatkan nilai biaya penggantian yang lebih besar daripada nilai rill yang di derita oleh Tertanggung. Penelitian ini di fokuskan pada seperti apa bentuk indikasi pelanggaran dalam sistem COB BPJS Kesehatan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peserta asuransi kesehatan dalam sistem COB. Studi ini menggunakan metode legal research dengan menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dengan prinsip hukum positif menggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yang paling utama dalam mengkaji permasalahan hukum yang muncul dan menimbulkan polemik di masyarakat. Harapannya kedepan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menganalisa ada tidaknya indikasi pelanggaran prinsip indemnitas dalam sistem COB BPJS Kesehatan dan dapat digunakan untuk penyelesaian masalah terkait dalam disiplin Ilmu Hukum.

Kata kunci: *Coordination of Benefit, Prinsip Indemnitas, Perlindungan Konsumen.*

ABSTRACT

Health insurance as one of the human needs that today has become one of the basic needs that have been guaranteed by the constitution and become the right of every citizen. The state as the government has full obligation to guarantee the right through various policies one of them BPJS Health. One of the mechanisms used by "BPJS Kesehatan" as a custodian named Coordination of Benefit (hereinafter referred as COB) where the mechanism involves the private sector as the guarantor of commercial insurance. However, in practice there is an indication of violation of Indemnitas principle in COB system in BPJS Health where in reimbursement cost from party Insurers, Insured party should not get value of replacement cost which is bigger than value of real cost suffered by Insured. This research focuses on what forms of indication of violations in the BPJS Health COB system and how to form legal protection for health insurance participants in the COB system. This study uses legal research methods to find out whether there is a rule of law according to legal norms with the principle of positive law use of legislation as the main reference in reviewing emerging legal issues and polemic in society. In the end, this research can be used as a reference to analyze whether there is indication of violation of indemnity principle in COB BPJS Health system and can be used for solving related problems in discipline of Law Science.

Key words: *Coordination of Benefit, violation of Indemnitas, Consumer protection.*